

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS YANG
TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN HAK EKSEKUSINYA DALAM
MASA INSOLVENSI**



Oleh

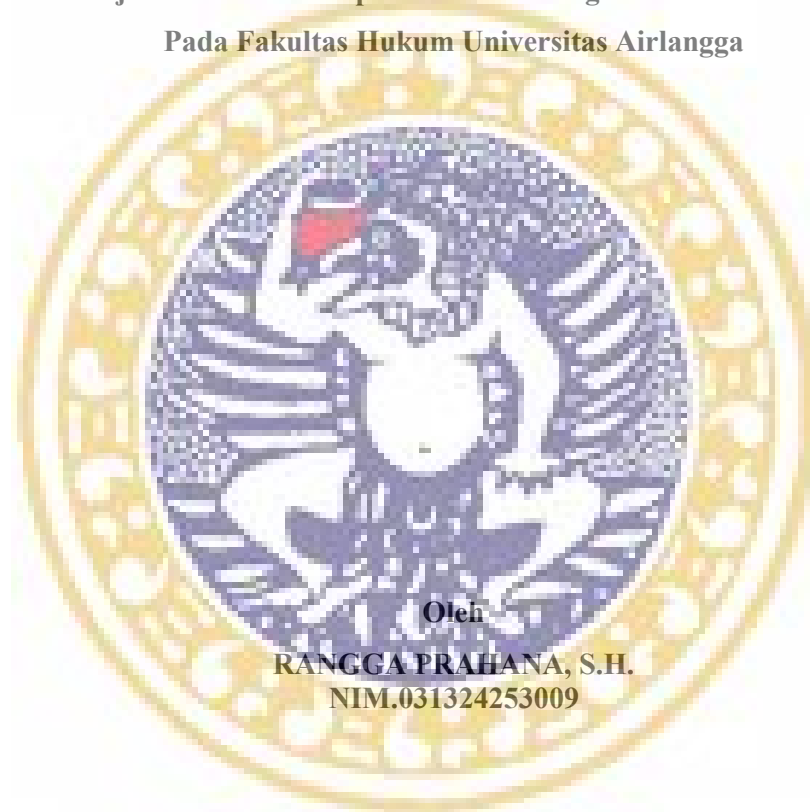
**RANGGA PRAHANA, S.H.
NIM.031324253009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS YANG
TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN HAK EKSEKUSINYA DALAM
MASA INSOLVENSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

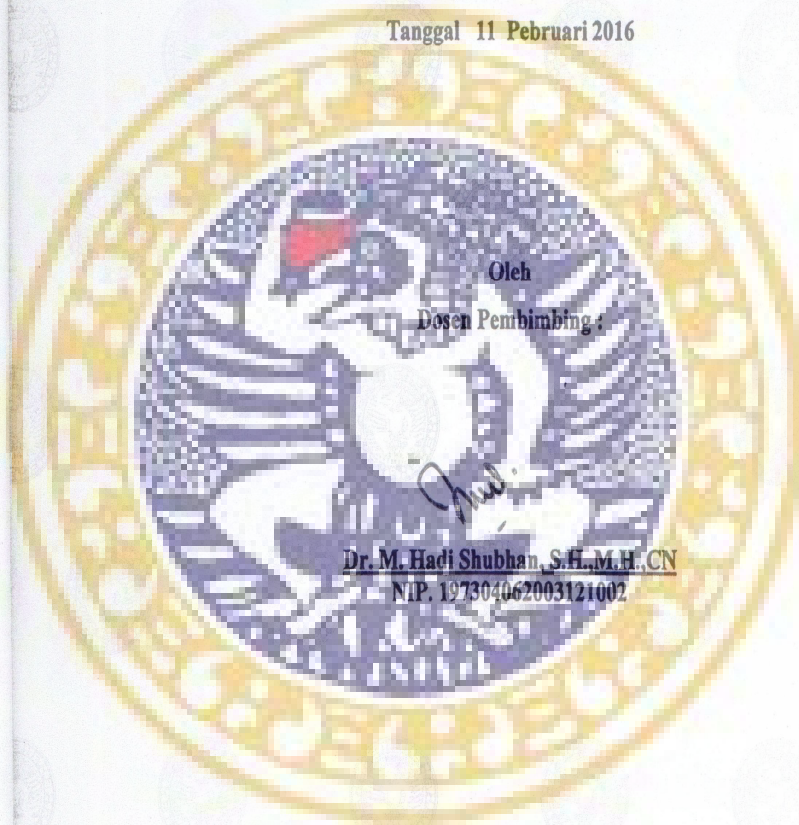


Oleh
RANGGA PRAHANA, S.H.
NIM.031324253009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 1 6**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 11 Pebruari 2016



Oleh
Dosen Pembimbing :

[Signature]
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,CN
NIP. 127304062003121002

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

[Signature]
Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum.
NIP. 196808101992031002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 11 Pebruari 2016**

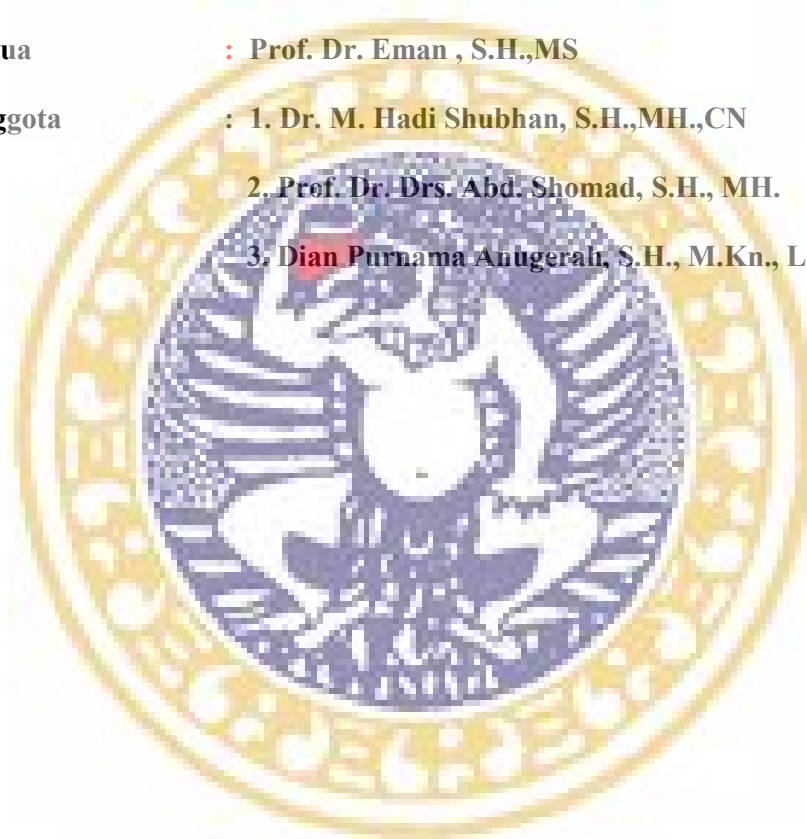
PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Eman , S.H.,MS

Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,MH.,CN

2. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



ABSTRAK

Pada jaman sekarang ini, jarang kita menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang baik bentuk utang jangka pendek, jangka menengah, maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pinjaman dana dari para kreditur, hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditur dalam hal debitur wanprestasi dengan tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam sumber pelunasan utang. Dalam hukum jaminan telah dinyatakan bahwa kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan jika debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Pada lembaga jaminan, selain hak untuk mengeksekusi benda jaminan, oleh undang-undang diberikan hak istimewa berupa hak separatis. Hak Separatis tersebut diberikan kepada kreditur pemegang hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Hak separatis tersebut berlaku ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan. Pada prinsipnya, harta pailit adalah harta yang dimiliki oleh debitur pailit baik yang dijaminakan maupun yang tidak dijaminakan. Hal ini, sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur separatis yang tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam masa insolvensi yaitu, “bahwa meskipun benda jaminan tersebut dieksekusi kurator, namun hasil dari penjualan atas eksekusi tersebut tetap khusus untuk pelunasan piutang kreditur separatis.” Hal ini, karena kreditur separatis tetap dijamin pelunasan piutangnya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pailit, Hukum Jaminan, dan Kreditur Separatis.

ABSTRACT

In this day and age it is rare to find an employer who did not use either form of debt debt facility short-, medium-, and long-term debt. Debt is already a factor that can not be separated in the world of economics, business and trade. Therefore, to obtain loans from the lenders, may only be conducted if the legal protection for creditors in the event of default by the debtor does not repay the debt on time can be used as an alternative to the sources of repayment. In the security law has stated that the creditor has the right to object executorial guarantees if the debtor is declared in default (default). At the security agency, in addition to the right to execute objects guarantees, by law granted privileges such as the right to separatists. The Separatists rights granted to creditors collateral rights holders are not included in the bankruptcy estate as the embodiment of the creditors rights holder of a security interest to take precedence over other creditors. The separatist rights applies when the debtor is declared bankrupt by the Court's decision. In principle, the bankruptcy estate is property owned by the debtor bankrupt either collateralized or unsecured. It is, in accordance with the provisions contained in Article 1 paragraph 1 and Article 2 (1) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. The form of legal protection against creditors separatists who can not exercise the rights of execution in a period of insolvency, namely, "that although objects such guarantee executed curator, but the proceeds from the sale of the execution of the special fixed for settlement of accounts receivable-secure creditor." This is because the secure creditor remains guaranteed repayment of its receivables in accordance with Article 55 paragraph (1) UUKPKPU.

Keywords: *Protection Law, Bankruptcy Law, Security, and Creditor Separatists.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Ridhonya tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Yang Tidak Dapat Melaksanakan Hak Eksekusinya Dalam Masa Insolvensi”** dapat saya selesaikan.

Saya menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., Mt., Ak., CMA, Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
- Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing tesis saya. Beliau sangat membantu dan selalu menyediakan waktunya untuk memberikan kesempatan saya untuk melakukan bimbingan. Segala petunjuk, nasihat, dan saran beliau telah menambah serta membuka wawasan berpikir pada diri saya. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat saya amalkan di kehidupan masa datang dan amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT. Amien.
- Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum, selaku Ketua Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

- Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku tim anggota dosen penguji tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Bapak Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang selama ini telah memberikan ilmunya di bidang hukum sehingga dapat menjadi bekal penulis di masa yang akan datang.
- Seluruh staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas dukungan selama masa kuliah.
- Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada:

- Hari Djuanedi dan Sutarti selaku orang tua saya, yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa materi maupun semangat untuk dapat lulus sarjana meskipun saya sering mengecewakan mereka.
- Hadi Prayitno dan Asmaningsih selaku mertua saya, yang telah banyak membantu dalam hal keperluan sarana selama perkuliahan.
- Chentya Merlita Dias, Raihan Tsaqib Affan, dan Rasya Rizky Ramadhan istri dan anak-anakku tercinta. Kesabaran dan dukungan kalian selama ini dalam berbagai hal telah membuat saya akhirnya bisa menyelesaikan studi ini. Semoga kelak saya bisa membahagiakan kalian semua. Amien.

- Notaris Fitri Kartikasari, S.H., CN, yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang dan kerja di kantor beliau, guna memperdalam ilmu kenotariatan.

Saya menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun saya berharap Insya Allah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pembaca dari kalangan hukum.

Surabaya, 29 Pebruari 2016

Rangga Prahana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	9
5.1. Tipe Penelitian	9
5.2. Pendekatan Masalah	10
5.3. Bahan Hukum	11
5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	11
5.5. Analisis Bahan Hukum	11
6. Sistematika Penulisan	12